

**MEMODERNISASI NEGERI DAN MENCIPTAKAN HARMONI:
KOLABORASI MISIONARIS, PEMERINTAH KOLONIAL, DAN ELITE
LOKAL DI POSO, 1892-1950**

Mohammad Sairin

Dosen Program Studi Sejarah Peradaban Islam UIN Datokarama Palu

Email: mohammadsairin@gmail.com

Abstract

This article describes the process of modernization and harmony creation in Tanah Poso by missionaries and the colonial government involving local elites. So far Poso historiography states that the Poso area was relatively safe before the 1998 Poso conflict broke out. In fact, the Poso people in the pre-colonial period were always haunted by a fear of tribal wars and the tradition of headhunting which was the custom of the local community. The periodization of this study takes the period between 1892-1950. 1892 was the first year the missionary Albert Christiaan Kruyt arrived in Poso. At that time, he recorded war between tribes. Through an ethnographic approach and support from the Dutch East Indies government, the missionaries succeeded in 'modernizing' and creating harmony for the Poso people. This 'modernization' program also received support from Poso's local elite. This support even continued after the proclamation of Indonesian independence. Raja Poso Talasa welcomed the Netherlands Indie Civil Administration (NICA) and managed to prevent resistance against NICA in Poso. The speech by Lora Molindo, Poso's representative at the Malino Conference in 1946, also reflected the same wishes as other local elites. In 1950 colonial rule in Central Sulawesi officially ended with the dissolution of RIS.

Keywords: Colonialization, Colonial Modernity, Missionary, Local Elite

Abstrak

Artikel ini menjelaskan proses modernisasi dan penciptaan harmoni di Tanah Poso oleh misionaris dan pemerintah kolonial dengan melibatkan elite lokal. Sejauh ini historiografi Poso menyatakan daerah Poso relatif aman sebelum pecahnya konflik Poso 1998. Padahal masyarakat Poso pada masa prakolonial selalu dihantui ketakutan atas terjadinya perang suku serta tradisi mengayau yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Periodisasi studi ini mengambil rentang waktu antara tahun 1892-1950. Tahun 1892 merupakan tahun awal kedatangan misionaris Albert Christiaan Kruyt ke Poso. Saat itu, ia merekam adanya perang antarsuku. Melalui pendekatan etnografis dan dukungan pemerintah Hindia Belanda, misionaris berhasil 'memodernisasi' dan menciptakan harmoni bagi masyarakat Poso. Program 'modernisasi' ini juga mendapat dukungan dari elite lokal Poso. Dukungan ini bahkan berlanjut hingga pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Raja Poso Talasa menyambut *Netherlands Indie Civil Administration* (NICA) dan berhasil mencegah perlawanan terhadap NICA di Poso. Pidato Lora Molindo, wakil Poso dalam Konferensi Malino tahun 1946, juga mencerminkan keinginan yang sama dengan elite lokal lainnya. Pada tahun 1950 kekuasaan kolonial di Sulawesi Tengah secara resmi berakhir dengan pembubaran RIS.

Kata kunci: Kolonialisasi, Modernitas Kolonial, Misionaris, Elite Lokal

PENDAHULUAN

Sebelum terjadinya konflik Poso pada tahun 1998, khususnya selama masa Orde Baru daerah Poso dikatakan tidak memiliki sejarah pergolakan.¹ Namun, jika melihat sejarah Poso lebih jauh ke belakang, wilayah Poso pada masa prakolonial adalah salah satu wilayah yang rentan konflik. Penyebabnya adalah seringnya perang antar suku dan adanya tradisi mengayau (*headhunting*) yang telah menjadi budaya masyarakat setempat. Wilayah Poso pada masa itu dihuni oleh berbagai macam kelompok suku di bawah kekuasaan seorang kepala suku yang terpilih berdasarkan prinsip *primus inter pares*, seperti suku *To Pebato*, *To Lage*, *To Onda'e*, *To Lamusa*, *To Pu'umboto*, *To Wingke mPoso* dan lainnya. Antar kelompok yang sama-sama menggunakan bahasa Bare'e tersebut sering kali terjadi peperangan. Begitu pula dengan suku-suku dari wilayah Lembah Palu dan Parigi yang juga sering kali menyerang wilayah Poso. Kondisi ini berlangsung hingga para misionaris dan kekuasaan kolonial masuk di wilayah Poso. Misionaris dan pemerintah kolonial mampu menghentikan tradisi perang antar suku di wilayah Poso dan sekitarnya. Atas dukungan para penguasa lokal mereka berhasil menjalankan modernisasi di wilayah tersebut.

Penelitian tentang dampak kolonialisme di Poso sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa ahli, antara lain Albert Schrauwers dan Joost Coté. Schrauwers memfokuskan kajiannya pada reformasi kolonial² yang berdampak terhadap kepercayaan, kehidupan rumah tangga, dan hubungan kekerabatan pada masyarakat Poso. Schrauwers juga mendapati bahwa reformasi kolonial juga telah berimplikasi pada pembentukan identitas baru masyarakat di wilayah ini yang sebelumnya terdiri dari beragam kelompok suku menjadi satu identitas tunggal yang dikenal sebagai *To Pamona*. Sementara itu, Coté dalam artikelnya³ membahas bagaimana modernisasi kolonial di Sulawesi Tengah, khususnya yang dilakukan oleh misi Protestan di Poso, berkontribusi pada intensifikasi yang laten mengenai batas-batas geografis dan identitas adat di kepulauan Indonesia. Namun, tampak bahwa hasil penelitian mereka masih melihat Poso dari perspektif negara kolonial, alih-alih melihat bagaimana menjelaskan kiprah masyarakat bumiputra sebagai subjek dan pelaku modernitas itu sendiri.

Tulisan ini ingin memberikan perspektif baru dalam menyikapi kehadiran kolonialisme di Indonesia, khususnya di wilayah Poso. Sejauh ini menurut cara pandang historiografi nasionalsentris⁴ yang acap kali bersifat chauvinis, kolonialisme sering kali ditampilkan dalam sisi gelapnya saja. Padahal jika kita menggunakan perspektif yang lebih netral dalam melihat kolonialisme, kita dapat menemukan sisi positif atas kehadiran kolonial. Begitu pula ketika seorang tokoh lokal bekerja sama dengan pemerintah kolonial sering kali dicurigai sebagai kaki tangan Belanda tanpa pernah menjelaskan mengapa mereka mengambil sikap demikian. Rekonstruksi historis serta perspektif yang

¹ McRae, *Poso: Sejarah Komprehensif Kekerasan Antar Agama Terpanjang Di Indonesia Pasca Reformasi*, 29.

² Schrauwers, *Colonial "reformation" in the Highlands of Central Sulawesi, Indonesia, 1892-1995*.

³ Coté, "Creating Central Sulawesi. Mission Intervention, Colonialism and 'Multiculturalism'"; Lihat juga Coté, "Colonising Central Sulawesi. The 'Ethical Policy' and Imperialist Expansion 1890-1910."

⁴ Tentang diskusi mengenai perspektif historiografi, lihat dalam Margana, "Historiografi Indonesia dari Nasionalsentris ke Globalsentris."

lebih berimbang perlu dilakukan untuk menjelaskan fenomena tersebut untuk dapat merekonstruksi peristiwa dan memahami perilaku aktor berdasarkan konteks waktu dan ruang serta jiwa zaman (*zeitgeist*).

METODE

Sebagai karya sejarah, tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Merujuk pada panduan yang ditawarkan oleh Kuntowijoyo, tulisan ini melewati sejumlah tahapan berikut: heuristik, verifikasi, interpretasi, dan berakhir pada proses historiografi.⁵ Sumber-sumber yang digunakan terdiri dari sumber primer, meliputi arsip koran, catatan perjalanan, terbitan resmi pemerintah yang sezaman, serta sumber sekunder berupa buku, artikel, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini. Sumber yang diperoleh kemudian diverifikasi validitasnya untuk menghindari bias fakta dalam sejarah. Setelah itu, proses interpretasi dilakukan dengan melakukan analisis dan sintesis terhadap sejumlah fakta sejarah yang kemudian dituangkan ke dalam tulisan ini sebagai karya historiografi.

PEMBAHASAN

Misionaris dan Kolonialisasi di Poso

Kehadiran pemerintahan kolonial Belanda di Sulawesi Tengah, khususnya di Poso pada akhir abad 19, dilandasi oleh tiga motif. Pertama, adanya “kolonialisme yang diundang”, yaitu kehadiran pemerintah kolonial di suatu wilayah berdasarkan “undangan tak diminta” dari para penguasa bumiputra untuk mengintervensi perselisihan antara dua kelompok bumiputra yang bermusuhan. Kedua, kepentingan ekonomi dan politik pemerintah Hindia Belanda atas wilayah Sulawesi Tengah, Ketiga, keinginan untuk “memberadatkan” penduduk bumiputra oleh misionaris Kristen dan pemerintah kolonial Belanda.⁶ Salah satu contoh kasus motif “kolonialisme yang diundang” tersebut dapat dilihat dari sebuah surat yang dibuat oleh seorang bangsawan Poso bernama Towah. Ia meminta perlindungan kepada pemerintah kolonial atas aktivitas perampokan yang disertai pembunuhan terhadap anggota sukunya yang dilakukan oleh orang-orang *Kulawi, Besoa, Bada, Lindu, Pipikoro, Palu, Sigi* dan *Dolo*.⁷ Towah berharap agar pemerintah Hindia Belanda mengintervensi dan melibatkan diri atas konflik antar suku di wilayah Poso dan sekitarnya. Perang antar suku menjadi salah satu jalan masuk bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk menegakan hegemoninya atas wilayah Poso dengan menjadi penengah dari pihak yang bertikai.

Sejalan dengan permintaan penduduk Poso yang mengharapkan intervensi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan keamanan di Poso, Nederlandsch Zendeling Genootschap (NZG) bermaksud menjadikan Poso sebagai area baru pekabaran Injil setelah berkonsultasi dengan G.W.W.C Baron van Hoevell, Asisten Residen Gorontalo. Mula-mula mereka melakukan misi pekabaran Injil itu bertempat di Gorontalo, namun

⁵ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, 73–80.

⁶ Sairin, “Bangsawan Sigi dalam Arus Perubahan,” 60–63.

⁷ Adriani, “Verhaal der Ontdekkingsreis van Jhr. J.C.W.D.A. van der Wyck naar het Posso-Meer, 16-22 October, 1865,” 855.

prosesnya tidak berjalan maksimal karena penduduk Gorontalo telah banyak yang memeluk Islam. Atas saran Baron van Hoevell, Poso dipilih sebagai lokasi misi zending yang baru karena pengaruh Islam belum terlalu kuat. Hanya di wilayah pesisir Poso saja dijumpai penganut Islam, sementara di wilayah pedalaman penduduknya masih menganut kepercayaan tradisional. Dua orang misionaris yang pertama kali diutus ke Poso adalah Albert Christiaan Kruijt (1869-1949), putra seorang misionaris di Jawa Timur, dan Nicolaas Adriani (1865-1926), putra Direktur Asosiasi Misionaris Utrecht dan keponakan Direktur NZG.⁸

Misi zending di Poso awalnya tidak berjalan mulus. Penduduk dan bangsawan di Poso enggan untuk beralih agama menjadi Kristen karena takut dengan penguasa Luwu dan Sigi yang secara tradisi telah berkuasa atas suku-suku di Poso. Menyadari bahwa misi zending yang mereka rintis di Poso semenjak tahun 1892 berjalan sangat lamban dan tidak mengalami kemajuan yang berarti, Kruijt dan Adriani melakukan perjalanan ke Luwu dan Sigi untuk melobi kedua penguasa tersebut. Mereka kemudian menyarankan kepada pemerintah untuk menjalankan penaklukan dengan mengerahkan kekuatan militer.⁹ Pemerintah kolonial berhasil memaksa penguasa Luwu dan Sigi untuk melepaskan wilayah kekuasaan mereka di Poso. Akhirnya Kristenisasi yang didukung oleh kekuatan militer itu menunjukkan hasilnya. Papa I Wunte, Kepala Suku Pebato yang dulu tunduk kepada Kerajaan Sigi akhirnya bersedia dibaptis pada bulan Desember 1909. Ia adalah bangsawan Poso pertama yang dibaptis dan segera diikuti pembaptisan massal di seantero Poso.¹⁰

Pemerintah kolonial mendukung sepenuhnya misi zending untuk meningkatkan kapasitas hidup masyarakat setempat sekaligus mencegah perkembangan Islam di pesisir Poso. Jalannya misi tersebut berbarengan dengan upaya modernisasi yang menginspirasi A.J.N. Engelenberg, seorang pegawai kolonial Belanda yang ditugaskan menjadi kontrolir Poso pada 1901, yang kemudian mendapatkan promosi menempati posisi sebagai Asisten Residen Midden-Celebes pada 1905-1908, tepat sesaat afdeling baru itu terbentuk pada 1904. Sebagai pegawai yang mengenal lebih dekat wilayah tugasnya, ia menyarankan pemerintah kolonial agar wilayah baru ini harus ditaklukkan dan menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda. Kala menjadi Asisten Residen, Engelenberg berupaya untuk menerapkan gagasan modernisasinya terhadap penduduk bumiputra, termasuk pada saat ia mengumpulkan para raja dan calon raja yang ada di Afdeling Midden-Celebes pada Oktober 1906 di Donggala, yang menghasilkan keputusan-keputusan berikut: 1) setiap daerah wajib untuk mempertahankan ketertiban dan ketenteraman; 2) membentuk daerah-daerah swapraja dan mengelola perbendaharaan sendiri; 3) melaksanakan pungutan pajak dan kerja wajib untuk pembuatan jalan; 4) pembukaan sawah, penempatan dan penggabungan desa-desa atas pertimbangan

⁸ Schrauwers, *Colonial "reformation" in the Highlands of Central Sulawesi, Indonesia, 1892-1995*, 51.

⁹ Li, "The will to improve," 124.

¹⁰ Sairin, "Bangsawan Sigi dalam Arus Perubahan"; Nadjamuddin, *Dari Animisme ke Monoteisme: Kristenisasi di Poso 1892--1942*, 88.

kesehatan dan lokasi yang strategis; 5) melarang pelaksanaan ritual keagamaan tertentu; 6) penghapusan perbudakan; serta 7) larangan membawa senjata api.¹¹

Modernitas Kolonial di Tanah Poso

Kehadiran misi zending dan pemerintah kolonial Hindia Belanda di wilayah Poso telah membawa perubahan-perubahan penting yang mendasar. Menurut A.C. Kruyt, pengaruh peradaban Barat, khususnya Hindia Belanda terhadap penduduk Poso dan sekitarnya berinti pada sembilan hal pokok, yakni tata letak pembangunan rumah, pembukaan sawah, pembayaran pajak, penghentian perburuan kepala (mengayau), penghentian pensucian jenazah/tulang mayat, pengadaan sekolah, kesehatan, kebudayaan, dan tanggung jawab masyarakat untuk menyelesaikan masalah sosial sendiri.¹² Berikut ini beberapa perubahan dan perbaikan yang dilakukan oleh misionaris dan pemerintah kolonial di Poso

a. Menghentikan Perang Antar Suku dan Tradisi Mengayau

Salah satu persoalan awal yang dihadapi oleh misionaris ketika tiba di Poso adalah perang antar suku. Ketika Kruyt sampai di Poso, *To Napu* sudah beberapa tahun berperang dengan *To Onda'e*. *To Napu* untuk itu terkadang keluar dari pegunungan dan menyerang secara acak desa *Onda'e*. Untuk tiba di *Onda'e*, *To Napu* harus bergerak melalui *Pebato*, suatu hak yang diakui oleh adat, asalkan penduduk negeri yang netral itu tidak mempunyai sangkut paut dengan orang-orang perang yang bergerak maju itu, misalnya dengan memberi makanan kepada mereka. Ketika dalam tahun 1893, suatu desa tempat suku *Onda'e* bermukim telah mengalami serangan sekonyong-konyong dari gerombolan *To Napu*, maka sekelompok *To Onda'e* melakukan penyerbuan kepada perkampungan *To Pebato* karena mau membalas dendam, dengan mengatakan bahwa *To Pebato* tidak bersikap netral. Hal ini membuat *To Pebato* memihak kepada *To Napu*. Dalam keadaan ini seorang kepala *To Lage* yang mempunyai pengaruh besar, menganggap kewajibannya untuk mencampuri peperangan itu berada di pihak *To Onda'e*. Di waktu pertempuran pertama dengan sekelompok *To Napu* pada akhir tahun 1893 tewaslah seorang bangsawan yang bernama Bengka. Ini lebih memperumit konflik. Bengka ini adalah ipar raja Parigi, sehingga berniat membalaskan kematian Bengka. Makanya Parigi dengan segera bersedia untuk maju berperang, melawan Napu dan Pebato.¹³

Dapat dikatakan bahwa pencapaian gemilang yang dilakukan oleh pemerintah kolonial di Poso adalah penghentian perang antar suku. Biasanya perang antar suku dilakukan untuk mencari manusia untuk dijadikan korban persembahan bagi *Dewa*, supaya masyarakat berhasil dalam panen dan diberi keselamatan. Di wilayah Poso sendiri, terdapat beberapa suku-suku yang sering berperang satu sama lain, seperti *To Lage*, *To Pebato*, *To Onda'e*, *To Napu*, *To Bada*, *To Besoa*, *To Wingke mPoso*, *To Pu'umboto*, *To Pakambia* dan beberapa suku lainnya. Ada kebiasaan khas dari suku-suku ini ketika

¹¹ Sairin, "Bangsawan Sigi dalam Arus Perubahan," 64–65.

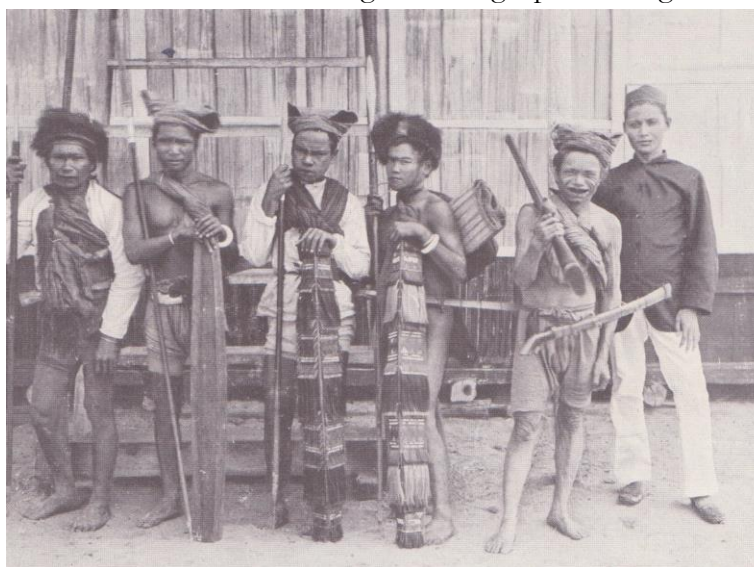
¹² Kruyt, "The influence of Western civilisation on the inhabitants of Poso (Central Celebes)."

¹³ Kruyt, *Kabar keselamatan di Poso*, 92–93.

berperang, yakni memenggal kepala musuhnya. Budaya ini disebut '*mengayau*'. Semakin banyak kepala musuh yang dipenggal, semakin naik pula prestise seseorang. Mereka yang memiliki keberanian dalam peperangan maupun dalam membela sukunya biasanya diberi gelar *Tadulako*. Perang antar suku sering menyebabkan jumlah penduduk semakin berkurang—selain karena adanya kondisi kesehatan yang buruk, wabah penyakit, hukuman mati, dan persembahan korban manusia. Selain perang antar suku, ada juga kebiasaan dari masyarakat Poso di zaman dulu, yang mana ketika seorang kepala suku atau tetua adat meninggal maka dilakukan upacara pengorbanan manusia. Biasanya yang menjadi korban adalah kaum budak. Kepala korban disimpan di atas kuburan kepala suku tersebut sebagai persembahan terhadap dewa.

Gambar 1

To Pebato dengan Perlengkapan Perang



Sumber: N. Adriani dan Alb.C Kruyt (1950)¹⁴

Tidak mudah menghilangkan kebiasaan perang antar suku ini, tetapi dengan berbagai pendekatan yang dilakukan terhadap masyarakat setempat, pemerintah berhasil melakukannya. Kebiasaan perburuan kepala manusia oleh masyarakat Poso diganti dengan membangun *lobo*, semacam rumah persembahan di tiap desa. Pembangunan kuil dipandang memiliki tujuan yang sama dengan mengayau atau pencarian kepala manusia, yakni untuk keselamatan dan untuk keberhasilan panen karena roh dewa pelindung desa dianggap tetap bersemayam di rumah persembahan itu.¹⁵ Meskipun para misionaris berusaha untuk mengkristenkan masyarakat Poso, tetapi banyak kepercayaan lama yang masih bertahan.

¹⁴ Adriani dan Kruyt, *De Bare'e Sprekende Toradjas van Midden-Celebes (De Oost-Toradjas)*.

¹⁵ Hasan dkk., *Sejarah Poso*.

b. *Menata Pemukiman Penduduk dan Pembangunan Infrastruktur*

Banyak permukiman penduduk di daerah Poso pada masa lampau berada di atas bukit. Hal ini dilakukan guna menghindari serangan dari suku lain, sebuah pola pertahanan sederhana. Walaupun begitu tidak berarti serangan dapat dihindarkan sama sekali. Pola pemukiman di atas bukit rupanya menyulitkan pemerintah kolonial Belanda dalam mengonsolidasi dan mengatur kehidupan sosial penduduk Poso. Dengan alasan inilah pemerintah kolonial kemudian memindahkan pemukiman penduduk ini ke dataran rendah.

Gambar 2

Perkampungan lama (kiri) dan perkampungan baru (kanan)



Sumber: N. Adriani dan Alb.C Kruyt (1950)

Pemukiman baru dibangun di tepi jalan yang telah dibuka oleh pemerintah, sehingga memudahkan perhubungan dengan kampung lainnya. Alasan lainnya juga berasal dari segi kesehatan, yakni untuk menghindari wabah penyakit yang mudah menyebar di pemukiman yang kumuh dan tidak teratur.

Poso merupakan kota kolonial di Sulawesi Tengah, selain Donggala, Luwuk, dan Kolonodale. Kota kolonial ini ditandai dengan hadirnya bangunan gereja, rumah kontrolir, kantor pemerintahan, tangsi atau barak tentara, lapangan atau alun-alun, pasar, maupun jalan-jalan yang ditumbuhi pohon sepanjang jalan dan juga adanya parit-parit drainase.

Pembukaan jalan juga membawa keuntungan dari sisi ekonomis karena para pedagang Bugis, Arab, maupun Cina yang tinggal di daerah pesisir dapat dengan mudah menjangkau pemukiman penduduk. Mereka membeli komoditi lokal untuk dijual kembali ke daerah luar. Tidak hanya perhubungan darat saja yang dibangun oleh pemerintah kolonial. Mereka juga membangun pelabuhan Poso yang pada perkembangan selanjutnya disinggahi oleh kapal-kapal milik perusahaan *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM) yang menghubungkan daerah Poso dengan daerah-daerah lainnya di sekitar Teluk Tomini. Paling tidak dengan tersedianya angkutan laut ini, penduduk Poso bisa pergi ke daerah lainnya dan mendapatkan informasi baru tentang

perkembangan “dunia luar”, sesuatu yang sangat penting bagi terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat Poso.

c. *Penghentian Upacara Kematian*

Menurut kepercayaan lama orang Poso, alam terbagi atas tiga bagian yakni dunia atas atau langit tempat tinggal *Lamoa*; dunia tengah atau bumi yang didiami oleh manusia; dan dunia bawah sebagai tempat *Angga* atau roh orang mati bersemayam. Roh orang mati akan turun ke dunia bawah apabila jenazah sudah tidak berbau atau dagingnya sudah bersih. Dalam upacara kematian ada empat kegiatan penting yang dilakukan; yaitu *mongkariani*, *mompemate*, *mogawe*, dan *melea*. *Mongkariani* adalah praktik menyemayamkan jenazah sebagai bentuk penghormatan kepada mayat. Pada tahap ini, mayat dijaga secara bergantian oleh para kerabat sampai pada batas waktu tertentu untuk menghindari gangguan dari binatang atau roh jahat, juga agar kehidupannya di alam kubur menjadi lebih tenteram. Upacara penguburan dilakukan setelah upacara *mongkariani* selesai. Upacara ini terdiri dari dua rangkaian upacara yakni upacara *mompemate* dan *mogawe*. *Mompemate* adalah upacara penyimpanan mayat di *tambea*, semacam pondok kecil yang tidak beratap hingga menjadi tulang. Tempat penyimpanan ini terletak cukup jauh dari pemukiman penduduk. Upacara *mompemate* berlangsung selama dua hari. Setelah upacara *mompemate* selesai, maka upacara berikutnya adalah *mogawe* atau upacara pemindahan tulang belulang jenazah untuk selama-lamanya pada tempat tertentu, seperti gua-gua atau lubang batu. Jarak antara upacara *mompemate* dengan *mogawe* antara satu sampai dua tahun, karena dalam rentang waktu ini daging jasad sudah hancur, sehingga yang tersisa hanya tulang-tulang, kemudian tulang-tulang tersebut dikumpul lalu disatukan dalam sebuah peti. Upacara terakhir, *melea*, yaitu berkunjung ke tempat penyimpanan tulang untuk memberi doa kepada orang mati, agar selamat dalam perjalanan menuju alam baka dan rohnya diterima oleh *Lamoa*. Upacara ini dilakukan setelah seluruh rangkaian upacara penguburan selesai.¹⁶

Upacara-upacara penguburan sebagaimana disampaikan di atas, di kemudian hari dilarang oleh pemerintah kolonial dengan alasan kesehatan. Pemerintah kolonial berusaha menghentikan kebiasaan masyarakat yang mengeluarkan jenazah untuk membersihkan dan memindahkan tulang-tulang mayat. Pemerintah kolonial hanya mengizinkan perayaan upacara kematian yang mengiringi pembersihan tulang-tulang mayat, tetapi melarang keras pemindahan tubuh mayat dari peti mati.¹⁷ Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan penularan wabah penyakit dari jasad dan tulang belulang tersebut.

d. *Membentuk Kerajaan Poso*

Sebelum kehadiran pemerintah kolonial, pola kekuasaan dan kepemimpinan tradisional suku-suku di Poso dikenal dengan prinsip *primus inter pares*, di mana pemimpin suatu suku merupakan tokoh kharismatik yang dipilih karena dianggap terbaik dari kelompoknya. Kepala suku disebut *Kabosenya*. Tugas mereka adalah memimpin

¹⁶ Nadjamuddin, *Dari Animisme ke Monoteisme: Kristenisasi di Poso 1892-1942*, 47-53.

¹⁷ Kruyt, “The influence of Western civilisation on the inhabitants of Poso (Central Celebes)”; Hasan dkk., *Sejarah Poso*.

kelompoknya dalam membuka lahan pertanian dan permukiman, menjaga keharmonisan dalam dunia spiritual melalui berbagai upacara, mengatur hubungan dengan kelompok lain, serta melindungi anggota kelompoknya dari serangan kelompok lain atau menggerakkan anggota kelompoknya untuk menyerang kelompok lain.¹⁸ Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sering kali antar suku tersebut terlibat perang satu sama lain. Suku-suku di Poso tersebut umumnya tunduk kepada kekuasaan Datu Luwu. Mereka berstatus sebagai *palili* (daerah bawahan) Kedatuan Luwu. Sementara To Pebato, selain tunduk kepada Luwu, juga rutin mengirimkan *pekasuvia* (upeti) kepada Magau (Raja) Sigi di Lembah Palu.

Setelah pembebasan dari Luwu dan Sigi oleh pemerintah kolonial, suku-suku di Poso tidak lagi terikat secara kekuasaan dengan kedua kerajaan tersebut. Di kemudian hari, pemerintah kolonial lalu mereorganisasi dan menyatukan suku-suku tersebut dengan membentuk Kerajaan atau Landschap Poso pada tahun 1916. Landschap Poso dibentuk dari gabungan tiga Landschap, yaitu Lage, Onda'e dan Pebato. Landschap Lage pada awalnya merupakan gabungan dari 5 landschap, yakni Lage, Bantjea dan Poe'oemboto (berdasarkan Besluit 27 Desember 1911), ditambah dengan Landschap Palande dan Lamusa (berdasarkan Besluit 1 Maret 1913). Sementara Landschap Pebato adalah gabungan dari bekas wilayah vasal Sigi, yakni: yakni Pebato, Tambarana, dan Mapane. Jadi, Landschap Poso secara historis terbentuk dari gabungan beberapa landschap yang di masa lampau masing-masing memiliki pemimpin suku (*kabosenya*), meliputi Pebato, Onda'e, Lage, Lamusa, Bantjea, Poe'omboto, Palande, Tambarana, dan Mapane.

Gambar 3

Para Kepala Suku di Poso (berbusana tradisional)
Sebagai Kepala Distrik dalam Sistem Birokrasi Kolonial



Sumber: N. Adriani dan Alb.C Kruyt (1950)

Pemerintah Hindia Belanda mengangkat Lasaimpu alias Papa I Owo, seorang Kabosenya Lage sebagai Kepala Landschap atau Raja Poso pertama. Ia menandatangani *Korte Verklaring* (perjanjian pendek) yang disodorkan oleh pemerintah kolonial pada 26

¹⁸ Schrieke, *Indonesian Sociological Studies*, 176–81; Li, “The will to improve,” 121.

Februari 1917. Papa I Owo tidak lama memerintah, atas permohonannya ia diberhentikan dengan hormat pada tahun 1919. Selanjutnya Pemerintah Hindia Belanda mengangkat Talasa, seorang Kabosenya Lage sebagai Kepala Landschap Poso. Talasa juga menandatangani *Korte Verklaring* 30 Agustus 1920. Talasa kemudian diberi gelar *Mokole Bangke* (Raja Besar). Talasa memimpin Poso sepanjang hayatnya, sampai ia wafat pada 1949. Landschap Poso dibagi dalam 5 distrik, yakni Distrik Poso, Pebato, Tentena, Pu'umboto, dan Onda'e. Masing-masing distrik dipimpin oleh seorang kepala distrik dengan gelar *Witi Mokole*.¹⁹

Para kabosenya di wilayah Poso dijadikan sebagai aparat pemerintahan dalam birokrasi kolonial setara dengan kepala distrik. Untuk memudahkan urusan kontrolir dengan kepala distrik maka diangkatlah para asisten pemerintahan yang berasal dari kalangan bumiputra. Tidak hanya itu saja, sebagai kepala distrik mereka dibantu oleh *klerk* atau juru tulis yang diangkat dari orang-orang terdidik. Biasanya mereka didatangkan dari Minahasa. Ini dilakukan sebagai wujud pemerintahan *indirect rule* atau pemerintahan tidak langsung oleh pemerintah kolonial sebagai bentuk birokrasi legal rasional yang dipraktikan di Poso. Pembentukan Landschap Poso merupakan salah satu cara Pemerintah Hindia Belanda untuk menyatukan suku-suku di Poso sekaligus untuk memudahkan kontrol atas suku-suku tersebut.

e. *Pendidikan Formal dan Penyebaran Agama Kristen*

Pendekatan yang digunakan oleh Kruyt dan Adriani dalam menjalankan misinya adalah dengan menerapkan metode etnografi yang banyak dipengaruhi Teologi Etis di Negeri Belanda. Mereka punya perhatian yang sungguh-sungguh terhadap adat dan agama suku. Mereka turut menerjemahkan Injil ke dalam bahasa setempat sehingga memudahkan penduduk setempat mempelajarinya. Poso akhirnya menjadi salah satu ladang misi Kristen paling berhasil di Hindia Belanda.²⁰ Selain itu mereka juga mendirikan sekolah dan meminta pemerintah mendatangkan guru-guru dari Minahasa.

Poso merupakan daerah yang pertama kali mendapat pendidikan formal di Sulawesi Tengah. Sebelum politik etis diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda, di Poso telah dibangun beberapa buah sekolah. Atas upaya Albertus Christiaan Kruyt, sekolah pertama berhasil dibangun pada bulan Juli 1894 di kampung Panta. Sebagai tenaga pendidik, Kruyt mendatangkan seorang guru dari Minahasa bernama Kolondam. Ia bersama istrinya tinggal di sebuah rumah yang khusus disediakan bagi mereka. Kemudian pada bulan Oktober 1894, Kruyt membuka lagi sebuah sekolah di kampung Tomata. Sekolah ini dipimpin oleh A.O. Kaligis, seorang guru yang didatangkan dari Manado. Tidak lama kemudian, sekolah lainnya dibangun Buyumboyo dengan guru bernama Sekeh, juga dari Manado.

Awalnya sekolah-sekolah yang dirintis oleh misionaris mengalami kekurangan murid, sebab penduduk menganggap pendidikan tidak penting. Untuk menyiasatinya maka dilakukan pendekatan kepada kepala suku dan tetua adat agar menganjurkan masyarakatnya untuk bersekolah. Pada masa ini sekolah berfungsi sebagai tempat belajar

¹⁹ *Encyclopedie van Nederlandsch-Indië, Deel VII (Suplemen)*, 361–62.

²⁰ Klinken, "Eskalasi di Poso," 121.

membaca dan menulis serta juga sebagai tempat mempelajari agama Kristen. Sampai tahun 1910 sekolah-sekolah masih didominasi oleh pelayanan yang diberikan zending. Sekolah yang didirikan dan dikelola oleh zending, meskipun mendapatkan subsidi dari pemerintah, masih terbatas di lokasi pelayanan mereka dan umumnya hanya diperuntukkan bagi umat Kristen. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, terutama di daerah yang belum tersentuh oleh zending Kristen, pemerintah mendorong pendirian dan pembukaan sekolah-sekolah khususnya pendidikan tingkat dasar kepada penduduk bumiputra. Kebutuhan terhadap lembaga pendidikan dibagi menjadi dua: penguasa adat ikut bertanggung jawab memberikan subsidi, sementara pemerintah menyediakan tenaga guru. Tujuannya adalah untuk memberikan kesadaran kepada para penguasa adat tentang pentingnya pendidikan dan tanggung jawab bersama untuk mencerdaskan rakyatnya.

Kristenisasi di Poso dilakukan dengan cara persuasif. Para penginjil tidak memaksa penduduk untuk segera beralih dari kepercayaan tradisional kepada agama Kristen. Salah satu contohnya, seorang Kabosenya Pebato yang bernama Papa I Wunte, berhasil dikristenkan setelah menunggu waktu selama 17 tahun lamanya sejak kegiatan zending dirintis pada 1892. Para penginjil dengan tekun mempelajari seluk beluk adat istiadat masyarakat setempat. Mereka mempelajari budaya dan bahasa lokal dan mendirikan sekolah-sekolah. Metode ini sebenarnya lazim digunakan oleh hampir semua misionaris di Hindia Belanda. Akan tetapi, para misionaris di Poso seperti A.C. Kruyt dan N. Adriani berusaha mengkaji dan memperdalam pengetahuan mereka terhadap agama suku. Di samping itu, mereka melakukan penerjemahan terhadap kitab Injil dan buku-buku pelajaran sekolah ke dalam bahasa setempat (Bahasa Bare'e). Mereka bergaul dan berinteraksi dengan masyarakat dan menyampaikan keunggulan agama Kristen dibanding agama suku. Mereka menghasilkan banyak sekali karya ilmiah yang menjelaskan tentang kehidupan sosial budaya masyarakat Poso, bahkan di daerah lain yang mereka kunjungi.

f. Pelayanan Kesehatan.

Pieter Schuyt dan istrinya adalah orang yang memelopori pembukaan klinik kesehatan di wilayah Poso. Pelayanan medis seperti ini merupakan yang pertama di wilayah Sulawesi Tengah. Schuyt bertindak sebagai seorang misionaris yang juga berprofesi sebagai dokter. Ia tiba di daerah Poso pada Desember 1908 dan ditempatkan di kampung Kuku. Pada tahun 1917 hingga 1919 ia bekerja di Rumah Sakit Petronela di Yogyakarta untuk memperdalam kompetensinya di bidang ilmu kesehatan. Semenjak kedatangannya di Poso, selain kegiatan menyebarkan Injil, ia berupaya melakukan pemberantasan penyakit *frambusia*, sejenis penyakit kulit yang sulit diobati dengan cara tradisional. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai kutukan dewa. Untuk menyelesaikan persoalan ini, Schuyt bersama masyarakat membangun pondok untuk menampung para penderita penyakit ini. Obat yang digunakannya diberi nama "kasina" yang merupakan hasil ramuan bahan tradisional asal Tiongkok. Masyarakat setempat menyebut pondok pengobatan ini dengan nama "*Kandepe Kasina*" (Pondok Kasina). Apa

yang dikerjakan oleh Schuyt telah tersebar dari mulut ke mulut, sehingga pasiennya bertambah banyak.²¹

Selanjutnya, karena pos pekabaran Injil di Kuku dipindahkan ke Tentena, maka pelayanan kesehatan juga berpindah ke Tentena. Ini terjadi pada tahun 1917. Mengatasi kebutuhan akan tenaga perawat, Schuyt mengirim tiga orang warga setempat untuk mendapatkan pendidikan sebagai perawat. Mereka adalah Gale Rangga dan Balawo Bando, keduanya dikirim ke Sangir Talaud, serta Manaja Torisumbi dikirim ke Rumah Sakit Immanuel Bandung. Mereka belajar menjadi mantri dan mendidik orang lain untuk pekerjaan yang sama.

Gambar 4
Rumah Sakit di Tentena



Sumber: N. Adriani dan Alb.C Kruyt (1950)

Pada tahun 1918 hingga 1920, pandemi Flu Spanyol mewabah di Sulawesi Tengah dan menyebabkan sekitar 2000 orang di Poso meninggal dunia.²² Oleh karena itu, dilakukan pembangunan rumah sakit permanen di Tentena pada tahun 1922 dengan harapan agar pelayanan kesehatan menjadi lebih baik. Rumah Sakit Tentena menjadi rumah sakit pertama di Sulawesi Tengah.²³

Peran Elite Lokal

Kolonialisasi dan modernisasi di Poso dapat berjalan dengan baik karena dukungan dari kepala suku yang ada di Poso, di antaranya yang banyak berperan adalah Papa I Wunte (*Kabosenya Pebato*), Talasa (*Kabosenya Lage*), *Pantjali Sigilipu*, dan *Lora Molindo* (Kepala Distrik Tentena). Untuk pembangunan infrastruktur mereka ditugaskan untuk menyediakan tenaga kerja, merancang penempatannya, serta menetapkan tugas yang hendak dikerjakan. Mereka juga diberikan tanggung jawab atas jumlah pekerja yang disediakan, pengawasan jalannya pekerjaan, termasuk tanggung jawab terhadap segala tindakan yang dianggap menyimpang oleh pemerintah kolonial: kecukupan tenaga kerja, kedisiplinan pekerja di tempat kerja, dan jaminan logistik bagi para pekerja. Besarnya tanggung jawab mereka ditukar dengan ketidakwajiban anggota keluarganya untuk ikut

²¹ Tobondo, "Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Wilayah GKST," 164–65.

²² Setiawan dkk., "History and Experience of Central Sulawesi Communities Facing the Influenza Pandemic 1918–1920."

²³ Tobondo, "Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Wilayah GKST," 165–67.

serta dalam pekerjaan pembangunan infrastruktur. Di samping itu, para kabosenya juga diberikan wewenang untuk membebaskan lahan yang akan menjadi tempat dalam proyek pembangunan pemerintah. Kondisi di atas-pelibatan penduduk biasa dan elite lokal dalam proyek pembangunan adalah bentuk pemanfaatan atas ikatan adat yang bersifat primordial dalam sistem kerja tradisional yang kerap disebut sebagai kerja wajib (*beerendiensten*).²⁴

Kolaborasi antara misionaris, pemerintah kolonial, dan elite lokal berlangsung hingga berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda. Bahkan tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ketika pasukan Sekutu bersama pasukan NICA tiba di Indonesia untuk memulihkan kembali kekuasaan Belanda, kaum bangsawan dan elite lokal di Poso bersedia menerima kembali kehadiran mereka.

Pasukan Sekutu dengan menumpang kapal perang Australia tiba di pelabuhan Poso pada 1 November 1945. Mereka menurunkan bekas Asisten Residen terakhir di Poso sebelum zaman Jepang, bernama Rijsdijk dengan beberapa orang Belanda lainnya yang dikawal oleh satu regu tentara NICA.²⁵ Di kawasan Timur Indonesia, Belanda berhasil membentuk Negara Indonesia Timur (NIT) pada bulan Desember 1946. Salah satu wilayah NIT adalah Daerah Sulawesi Tengah yang merupakan federasi dari lima belas kerajaan di Sulawesi Tengah, salah satunya Kerajaan Poso

Menyikapi kehadiran NICA di Poso, Pemuda Merah Putih di Poso yang berjiwa nasionalis dan pendukung republik dipimpin oleh Sidik Utina selaku pimpinan pemuda Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Yakob Lamadjuda (keduanya merupakan bekas anggota Heiho) merencanakan untuk mengadakan perlawanan terhadap kehadiran kembali penguasa Belanda. Mereka memiliki banyak senjata hasil rampasan dari Jepang. Namun rencana mereka ditentang oleh Raja Tua Poso, Talasa. Raja Tua Poso itu malah menerima kedatangan Belanda (NICA) kembali karena berita yang diterima di Poso mengabarkan bahwa Datu Luwu (Palopo) telah menerima juga NICA. Di depan pemuda-pemuda yang bersiap akan melawan Belanda *Mokole Bangke* Talasa bertempat di depan kantor pemerintahan Poso menyampaikan pernyataan: "*Sei vinanga mPoso, kasaenyamo yaku noparenta baree-ree posebuka raa. Sei yaku damompau rikomi pura-pura, kajela tua bangke ri Poso da noparenta kita pura-pura. Isema-sema anu baree mompokono naparenta dua kontorlolo, Ane to bugi, palai ri bugisi. Ane Gorontalo, palai ri Gorontalo. Ane Manado, palai ri Manado. Ane Java, palai ri Java*". Terjemahannya pernyataan Raja Talasa tersebut yakni: "Ini negeri Poso sudah begitu lamanya saya memerintah tidak pernah terjadi pertumpahan darah. Saya ingin berbicara kepada kamu sekalian bahwa, kedatangan tuan besar (Belanda) di Poso untuk memerintah kita semua. Siapa-siapa yang tidak menyukai pemerintahan tuan kontrolleur: Kalau dia orang Bugis, pergilah ke tanah Bugis. Kalau dia orang Gorontalo, pergilah ke Gorontalo. Kalau dia orang Manado, pergilah ke Manado. Kalau dia orang Jawa, pergilah ke Jawa".²⁶

Mendengar nasihat dari sang raja, maka pemuda PNI yang tergabung dalam Gerakan Merah Putih pimpinan Sidik Utina dan Yakob Lamadjuda bersama rakyat tak dapat berbuat apa-apa karena patuh pada rajanya. Dengan adanya larangan Raja Poso untuk melawan maka pemuda-pemuda yang telah siap dengan senjata di tangan lalu menyerahkan senjata-senjata mereka kepada tentara Sekutu/NICA. Senjata yang diserahkan berupa 3 pucuk senjata kaliber 12,7 ex senjata Jepang. 2 pucuk senjata watermantel ex senjata Jepang, 60 pucuk senjata karabijn Jepang, 10 pucuk senjata

²⁴ Nadjamuddin dkk., *Sejarah Pilkada Kabupaten Poso*, 12–13.

²⁵ Nainggolan, *Sejarah Daerah Sulawesi Tengah*, 80.

²⁶ Nainggolan, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Tengah*, 80–81.

revolver, dan 40 pucuk senjata *double loop*. Sementara senjata-senjata lainnya mereka buang di sungai dan laut.²⁷

Raja Tua Talasa memang dikenal sebagai pendukung Hindia Belanda dan berkawan dekat dengan para misionaris di Poso, walaupun sampai akhir hayatnya ia memilih untuk tetap menganut agama tradisional orang Poso, *Lamoa*. Atas dukungan dan jasa-jasanya, pemerintah kolonial menganugerahinya Bintang Perak Besar (*Groote Zilveren Ster*).²⁸ Kemudian atas sambutan dan penerimaannya terhadap NICA, Talasa kembali dianugerahi penghargaan *Ridder in de Orde van Oranje Nassau*.²⁹ Dukungan atas kehadiran kembali pemerintah Hindia Belanda juga dapat dilihat oleh pidato Lora Molindo, Kepala Distrik Tentena yang menjadi wakil rakyat Poso pada saat Konferensi Malino yang menjadi cikal bakal pembentukan Negara Indonesia Timur, beliau menerangkan;

“Toradja itoe ta’ mengenal aliran-aliran poelitik, akan tetapi semoeanja bersatoe padoe, mereka itoe hanya orang-orang yang berigama kristen Bangsa Toradja meminta soeatoe dewan Toradja dan lebih banyak sekolah-sekolah. Orang merasa bahwa masih banyak jang baroes dipeladjar. Bangsa-bangsa Toradja itu soeka sekali bekerdja bersama bersama dengan lain-lain golongan. Perboeboengan-perboebongan dengan orang-orang Belanda masih sangat moeda sekali. Daerah tsb. Baroe-baroe sadja terboeka. Mereka bersedia boeat bekerdja bersama-sama dengan negeri Belanda atas dasar oesoel-oesoel Pemerintah soepaja dapat mentjapai kemadjoean”.³⁰

Dukungan elit lokal Poso tersebut menunjukkan kenyataan bahwa kehadiran pemerintahan kolonial tidak selalu mendapat penolakan dari masyarakat bumiputra, namun juga mendapat tempat di hati masyarakat bumiputra. Salah satu faktornya adalah upaya “modernisasi” yang telah diperkenalkan oleh misionaris berkebangsaan Belanda beserta pemerintah kolonial.

KESIMPULAN

Kehadiran misionaris dan pemerintah kolonial telah menghasilkan perubahan sosial di Poso. Upaya yang dilakukan oleh misionaris dan pemerintah kolonial dalam menata Tanah Poso memiliki banyak dampak positif, salah satunya menciptakan persatuan orang-orang Poso yang pada masa sebelumnya sering kali terlibat konflik antar suku. Wajah kolonialisme tidak selalu menampilkan sisi gelapnya saja melainkan juga menampilkan sisi positif dan humanis. Modernisasi tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar jika tidak mendapat dukungan dari elite lokal yang bersedia bekerja sama dengan misionaris dan pemerintah kolonial.

Banyak perubahan dan keuntungan yang dihasilkan oleh misionaris yang didukung dan pemerintah kolonial dan elite lokal di Poso. Pada akhirnya modernitas kolonial dalam berbagai segi kehidupan masyarakat Poso telah membuat sebagian orang Poso, khususnya di kalangan elite lokal “merasa nyaman” berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Tanpa menafikan keberadaan tokoh dan pendukung ‘Merah Putih’, elite lokal di Poso sebenarnya masih mendukung kehadiran kembali pemerintah Belanda

²⁷ Nainggolan, 81.

²⁸ *Encyclopadie van Nederlandsch-Indië, Deel VII (Suplemen)*, 363.

²⁹ “Anoegerah Sri Baginda,” 2.

³⁰ “Bin Malino,” 2.

bahkan saat kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan. Mereka dengan senang hati menerima kembalinya kekuasaan kolonial Belanda pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kristenisasi yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah kolonial juga elite lokal berhasil memodernisasi sekaligus menciptakan harmoni di wilayah Poso.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, N., dan Alb. C. Kruyt. *De Bare'e Sprekende Toradjas van Midden-Celebes (De Oost-Toradjas)*. Vol. LVI. 2 vol. Verhandelingen Der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde. Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1950.
- Adriani, Nicolaas. "Verhaal der Ontdekkingsreis van Jhr. J.C.W.D.A. van der Wyck naar het Posso-Meer, 16-22 October, 1865." *De Indische Gids*, 1913.
- Pandji Ra'jat. "Anoegerah Sri Baginda." 24 September 1946. Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.
- Soeloeh Ra'jat. "Bin Malino." 19 Juli 1946. Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.
- Coté, Joost. "Colonising Central Sulawesi. The 'Ethical Policy' and Imperialist Expansion 1890–1910." *Itinerario* 20, no. 3 (November 1996): 87–107. <https://doi.org/10.1017/S0165115300003983>.
- . "Creating Central Sulawesi. Mission Intervention, Colonialism and 'Multiculturality.'" *BMGN - Low Countries Historical Review* 126, no. 2 (1 Januari 2011): 2. <https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.7308>.
- Encyclopedie van Nederlandsch-Indië, Deel VII (Suplemen)*. s'Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1935.
- Hasan, Darwis, Syakir Mahid, dan Haliadi. *Sejarah Poso*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.
- Klinken, Gerry van. "Eskalasi di Poso." Dalam *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*, 120–46. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Kruyt, Alb. C. "The influence of Western civilisation on the inhabitants of Poso (Central Celebes)." Dalam *The Effect of Western Influence on Native Civilisations in the Malay Archipelago*, 1–9. Batavia: G. Kolff & Co. Batavia, 1929.
- Kruyt, J. *Kabar Keselamatan di Poso: Sejarah Gereja Kristen Sulawesi Tengah sampai th. 1947*. Diterjemahkan oleh P.S. Naipospos. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1977.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.
- Li, Tania M. "The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia." Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2012.

- Margana, Sri. "Historiografi Indonesia dari Nasionalsentris ke Globalsentris." *Prisma: Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi*, 2020.
- McRae, Dave. *Poso: Sejarah Komprehensif Kekerasan Antar Agama Terpanjang Di Indonesia Pasca Reformasi*. Marjin Kiri, 2016.
- Nadjamuddin, Lukman. *Dari Animisme ke Monoteisme: Kristenisasi di Poso 1892–1942*. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia, 2002.
- Nadjamuddin, Lukman, Darwis, Sunarto Amus, Wilman D. Lumangino, dan Mohammad Sairin. *Sejarah Pilkada Kabupaten Poso*. Yogyakarta: Elpueblo Tritama Mandiri, 2017.
- Nainggolan, Nurhayati. *Sejarah Daerah Sulawesi Tengah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.
- . *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Tengah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982.
- Sairin, Mohammad. "Bangsawan Sigi dalam Arus Perubahan: Keluarga Lamakarate dalam Politik di Sulawesi Tengah, 1907-1982." Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2016.
- Schrauwers, Albert. *Colonial "reformation" in the Highlands of Central Sulawesi, Indonesia, 1892-1995*. Anthropological Horizons 14. Toronto: University of Toronto Press, 2000.
- Schrieke, B. J. O. *Indonesian Sociological Studies: Selected Writings Part One*. 2nd edition. Selected studies on Indonesia, v. 2-3. Bandung: Sumur Bandung, 1960.
- Setiawan, Adi, Nurhalisa Nurhalisa, Nanda Pratiwi, dan Haliadi Haliadi. "History and Experience of Central Sulawesi Communities Facing the Influenza Pandemic 1918—1920." *MOZAIK HUMANIORA* 22, no. 1 (30 Juni 2022): 1–14. <https://doi.org/10.20473/mozaik.v22i1.30677>.
- Tobondo, A.R. "Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Wilayah GKST." Dalam *Wajah GKST: Buku Kenangan 100 Tahun Injil Masuk Tana Poso*, 164–78. Tentena: Sinode GKST, 1992.